

PERDAGANGAN ANTARPULAU KOMODITAS CABAI DI INDONESIA: DINAMIKA PRODUKSI DAN STABILITAS HARGA

Chili Inter-island Trade in Indonesia: Production Dynamic and Price Stabilization

Herman Supriadi*, Wahyuning Kusuma Sejati

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mail: supriadi_h@yahoo.co.id

Naskah diterima: 1 November 2018

Direvisi: 21 November 2018

Disetujui terbit: 17 Desember 2018

ABSTRACT

This study was conducted in Central Java, West Java, and West Sumatra Provinces in 2016. Objectives of the study were analyzing trade performance as well as formulating policy alternatives to expand chili production and marketing. Chili production increased sharply in West Java Province, but it was relatively slow in Central Java, West Sumatra, Lampung and other provinces due to diseases and limited farm areas. Red chili production in Java and West Sumatra determined price stability in other regions. Chili production in West Sumatra Province did not meet its demand and, thus, it was supplied from Yogyakarta and Central Java. Government's attempts to stabilize red chili price and to minimize price disparity among regions were not successful due to insufficient production and high transportation cost. Agribusiness stations (STA) establishment in West Java was ineffective since inter-island traders controlled the market. Low farm-gate price and its fluctuations were due to unstandardized chili quality, increased production costs, asymmetric information, and farmers' low bargaining power. Chili price stabilization in Java Island is urgent as it determines selling prices in other provinces. Vertical coordination and marketing contract are alternatives to deal with fluctuating farm-gate price.

Keywords: *trade, inter-island, chilli, Indonesia*

ABSTRAK

Studi Perdagangan Antarpulau (PAP) komoditas cabai dilakukan pada tahun 2016 di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Tujuan penelitian adalah: (i) menganalisis kinerja perdagangan, dan (ii) merumuskan alternatif kebijakan untuk mendukung pengembangan komoditas cabai. Produksi cabai meningkat secara tajam di Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung, dan provinsi lainnya relatif lambat karena masalah penyakit dan keterbatasan lahan. Produksi cabai di Sumatera Barat masih belum memenuhi permintaan dimana arus distribusi cabai dari Yogyakarta dan Jawa Tengah ke Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat lebih banyak dari pada yang ke luar provinsi. Upaya pemerintah untuk stabilisasi harga cabai merah, menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil disparitas harga antardaerah belum berhasil karena kendala rendahnya produksi dan tingginya biaya pengangkutan. Pembangunan stasiun agribisnis (STA) seperti di Jawa Barat belum efektif menampung dan memasarkan hasil petani karena pemasaran sudah dikuasai oleh pedagang besar yang berkemampuan melakukan PAP. Rendahnya harga dan fluktuasi harga di tingkat petani disebabkan oleh beragamnya kualitas produk, meningkatnya biaya produksi, informasi tidak simetris, dan rendahnya daya tawar petani. Perlu upaya peningkatan dan stabilisasi produksi cabai merah di Pulau Jawa karena harga di Jawa sangat menentukan harga di wilayah lain. Koordinasi vertikal dan kontrak pemasaran dapat digunakan sebagai alat manajemen risiko pendapatan karena ada ketentuan harga jual bagi petani.

Kata kunci: *perdagangan, antarpulau, cabai, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hubungan perdagangan antarpulau di Indonesia berlangsung sejak abad ke-5 antara kerajaan-kerajaan Sumatera Tengah, Sriwijaya, Pajajaran, Bali, Ternate Maluku, dan Majapahit. Pada abad ke-16 perdagangan dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Demak, Banten, Cirebon, Banjar, dan Ternate. Banyaknya pulau dan perairan yang luas

merupakan tantangan dalam melakukan perdagangan antarpulau. Dengan berkembangnya perdagangan antarpulau, bukan hanya mampu mendorong pengembangan komoditas pertanian dan pendapatan petani tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan dan meningkatkan kesempatan kerja perdesaan, sehingga pada akhirnya akan dicapai ketahanan nasional. Pulau-pulau penting di Indonesia, pada umumnya memiliki pusat-pusat perdagangan.

Dalam konsep pengembangan wilayah, pengaruh dari perkembangan ekonomi suatu daerah tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, melainkan juga berdampak ke daerah sekitarnya (Adisasmita 2013).

Cabai merah merupakan komoditas strategis bagi Kementerian Pertanian, karena sangat dibutuhkan oleh rumah tangga. Komoditas ini sangat sensitif terhadap cuaca sehingga berakibat pada fluktuasi pasokan dan fluktuasi harga, sehingga berakibat cukup besar terhadap inflasi. Fluktuasi produksi cabai, selain disebabkan oleh musim, juga oleh terkonsentrasinya pusat-pusat produksi hanya di wilayah atau pulau tertentu, sementara konsumen cabai tersebar di hampir seluruh wilayah atau pulau di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadi senjang penawaran dan permintaan komoditas di wilayah tertentu yang mengakibatkan aliran produksi dari wilayah/pulau surplus ke wilayah defisit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pola/peta perdagangan antarpulau/wilayah komoditas cabai merah.

Perdagangan antarpulau atau yang lebih dikenal dengan perdagangan antarprovinsi adalah perdagangan komoditas dari suatu wilayah/daerah ke wilayah/daerah lain, baik melalui jalan darat, laut, maupun udara. Perbedaan sumber daya alam membentuk keunikan komoditas di masing-masing wilayah sehingga memicu terjadinya perdagangan antarwilayah. Selain itu, perdagangan antarwilayah terjadi karena keterkaitan antarwilayah, dimana satu wilayah tidak dapat menyediakan semua komoditas yang diperlukan untuk dikonsumsi masyarakat di wilayah tersebut (Simehate 2009). Perkembangan produksi dan konsumsi cabai merah menurut provinsi menunjukkan bahwa dalam skala nasional produksi komoditas tersebut termasuk surplus, tetapi di beberapa provinsi yang bukan sentra produksi terlihat minus.

Naully (2016) dalam tulisannya tentang fluktuasi dan disparitas harga cabai di Indonesia mendapatkan kesimpulan bahwa selama tahun 2010 sampai akhir 2015 terjadi fluktuasi harga yang disebabkan waktu tanam cabai yang sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 sementara harga terendah terjadi pada bulan Juli-Agustus 2011. Disparitas harga antardaerah mengalami penurunan. Rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan adalah Pemerintah perlu mengembangkan penanaman cabai diluar musim, pengaturan penanaman cabai dan mengembangkan kemitraan antara petani dan industri. Selain itu juga mendorong tumbuhnya

sentra sentra produksi cabai di luar Jawa dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk distribusi.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas harga cabai antardaerah adalah sentra produksi cabai terkonsentrasi di Jawa dan beberapa daerah di Sumatera, sedangkan wilayah konsumen mencakup Sabang sampai Merauke. Harga cabai di wilayah yang relatif sulit dijangkau (relatif terpencil) harganya cenderung lebih mahal dibanding harga cabai di wilayah yang mudah dijangkau. Semakin mudah wilayah dijangkau, maka semakin cepat proses distribusinya. Mudah dan tidaknya suatu daerah dijangkau terkait dengan infrastruktur jalan. Semakin baik infrastruktur jalan, harga cabai semakin rendah. Dalam rangka menciptakan harga cabai yang wajar dan stabil serta disparitas harga cabai yang kecil, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah perbaikan sistem distribusi, meliputi subsidi transportasi dan perbaikan infrastruktur jalan. Untuk infrastruktur jalan tampaknya sudah merupakan keharusan. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, disparitas harga harga pangan, termasuk cabai didalamnya, masih akan terus terjadi (Farid 2012).

Perdagangan antarpulau diharapkan mampu menghilangkan disparitas harga antara pulau, walaupun masih terkendala oleh infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, seperti proses bongkar muat yang relatif lambat dan juga keterbatasan dermaga. Perdagangan antarpulau merupakan salah satu upaya untuk mendistribusi komoditas pertanian yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan akses/keterjangkauan masyarakat terhadap komoditas pertanian terkait. Upaya distribusi pangan ini perlu ditingkatkan agar produk di daerah yang surplus dapat disalurkan ke daerah yang defisit. Perdagangan antarpulau dapat memberikan insentif bagi petani produsen untuk meningkatkan produksinya karena adanya jaminan pasar. Namun demikian masih terdapat kendala dan permasalahan pada perdagangan antarpulau antara lain barrier berupa kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemda akibat otonomi daerah, spekulasi perdagangan, aspek sosial dan kelembagaan perdagangan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perdagangan cabai antarpulau, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas cabai, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan perdagangan agar dicapai pengembangan komoditas pertanian yang lebih baik.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Perdagangan komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh produksinya. Produksi sendiri dipengaruhi oleh sumber daya (produsen dan ketersediaan lahan), serangan hama/penyakit, sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida), alsintan, dan iklim. Secara teoritis, perdagangan antarpulau dapat terjadi karena didorong oleh *factor endowment* (penawaran) dan saling ketergantungan (permintaan) di masing-masing wilayah (Gambar 1).

Apabila produksi lebih besar dari konsumsi maka di wilayah tersebut terjadi surplus, sebaliknya apabila produksi lebih kecil dibandingkan konsumsinya maka dikatakan defisit. Dampak dari surplus produksi adalah meningkatnya jumlah penawaran (pasokan) melebihi permintaan pasar dengan harga lebih murah dari kondisi biasanya, sebaliknya kalau defisit pedagang besar meningkatkan harga karena pasokan tidak memenuhi permintaan. Upaya yang bisa dilakukan supaya harga mendekati stabil adalah dengan ekspor atau menjual kelebihan produksi ke wilayah yang defisit, sebaliknya harus mendatangkan barang (impor) untuk wilayah defisit. Aliran barang akan terjadi dari daerah yang harganya rendah ke daerah yang harganya tinggi bila terjadi selisih lebih besar dari biaya transfer (*the law of one price*).

Keterkaitan harga antara produsen dengan konsumen (*vertical market*) dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pasar di suatu wilayah saling memengaruhi dengan pasar di wilayah lain. Tidak adanya keterkaitan

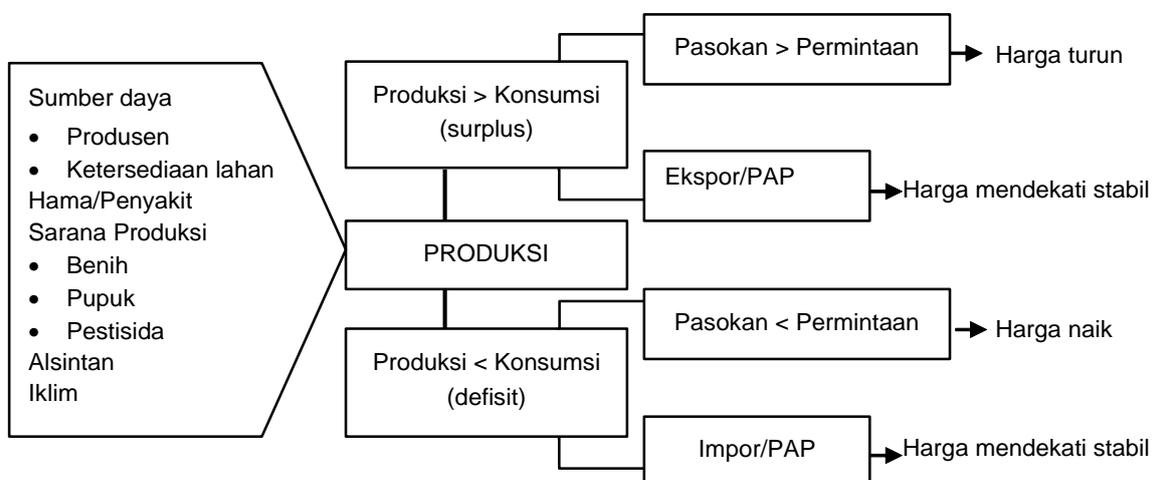
menunjukkan bahwa pasar tersebut tidak berhubungan atau diperkirakan arus barang tidak akan terjadi sedangkan keterkaitan yang kuat menunjukkan adanya arus barang antarwilayah tersebut.

Salah satu aspek yang terpenting dalam perdagangan adalah harga yang merupakan insentif yang diterima oleh pelaku perdagangan (termasuk petani) dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Berbagai faktor sangat memengaruhi harga antara lain dari sisi penawaran, sisi permintaan, kondisi dan struktur tata niaga yang terjadi. Salah satu aspek yang perlu untuk dikaji dari proses tata niaga adalah proses mekanisme pembentukan harga yang terjadi pada perdagangan komoditas. Dengan diketahuinya proses pembentukan harga maka dapat diidentifikasi posisi hubungan antara para pelaku tata niaga yang pada hakekatnya merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan tingkat harga yang terjadi.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas hasil produksi komoditas pertanian yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terjadi karena interaksi antarpulau memberikan efek perluasan dan efek timbal balik. Interaksi perdagangan antarpulau akan memberikan dampak positif bagi produsen komoditas pertanian di daerah yang mengalami surplus karena mempunyai pilihan untuk tujuan pasar.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian PSEKP yang dilakukan pada tahun



Gambar 1. Kerangka pemikiran perdagangan antarpulau komoditas cabai

2016, dengan rentang waktu bulan Maret sampai dengan bulan November. Tiga provinsi dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu (1) DKI Jakarta, sebagai daerah sentra konsumsi dan distribusi, (2) Jawa Barat sebagai daerah sentra konsumsi dan sentra produksi, dan (3) Sumatera Barat, sebagai daerah sentra produksi.

Data dan Teknik Pengumpulannya

Data yang digali terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pedagang (pengumpul, perantara dan antarpulau), kelompok tani, asosiasi komoditas, pelindo, karantina dan usaha pelayaran. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui pendekatan survai dan penggalan data dan informasi pada sejumlah responden. Data sekunder diperoleh di beberapa instansi seperti BPS, Badan Karantina Pertanian, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan pada kurun waktu lima tahun terakhir. Data yang diambil meliputi volume perdagangan antarwilayah, regulasi dan kebijakan perdagangan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif terkait dengan pola distribusi dan peta perdagangan antarpulau/wilayah, analisis kebijakan terhadap regulasi terkait perdagangan antarpulau/wilayah, analisis aspek-aspek yang terkait dengan jaringan pemasaran, margin pemasaran, dan elastisitas transmisi.

Analisis Margin Pemasaran

$$M_p = P_r - P_f$$

dimana:

M_p = Margin pemasaran (Rp/kg)

P_r = Harga ditingkat konsumen (Rp/kg)

P_f = Harga ditingkat produsen (Rp/kg)

$$S_{K_i} = \frac{K_i}{P_r - P_f} \times 100\%$$

$$K_i = P_{j_i} - P_{b_i} - \sum B_{j_i}$$

dimana:

S_{K_i} = Share keuntungan Lembaga Pemasaran Ke i

K_i = Keuntungan Lembaga Pemasaran ke i (Rp/kg)

P_{j_i} = Harga jual lembaga ke i (Rp/kg)

P_{b_i} = Harga beli lembaga ke i (Rp/kg)

B_{j_i} = Biaya pemasaran lembaga ke i dari berbagai jenis biaya mulai dari biaya ke j = 1 sampai ke h (Rp/kg)

Share biaya lembaga pemasaran ke i adalah:

$$S_{b_i} = \frac{B_i}{P_r - P_f} \times 100\%$$

Hubungan antara margin dengan harga eceran digunakan persamaan linear:

$$M = a + b P_r$$

dimana:

M = Margin pemasaran (Rp/kg)

a = Intersep

b = Koefisien regresi

Faktor-faktor yang memengaruhi margin pemasaran diestimasi dengan menggunakan persamaan ekonometrik berikut ini:

$$MM = a + b \cdot TP + c \cdot DM + d \cdot SY + e \cdot MS + g \cdot MC + h \cdot MP + E$$

dimana:

MM = Margin pemasaran (Rp/kg)

TP = Total produksi (ton)

M = Jarak antara petani dan pasar (km)

SY = Tingkat pendidikan petani

MS = Marketable surplus (ton)

MC = Biaya tata niaga (Rp/kg)

MP = Harga konsumen/retail (Rp/kg).

Analisis Elastisitas Transmisi Harga (ETH)

$$P_r = a + P_f \mu$$

Apabila $ETH < 1$, artinya perubahan harga 1% di pengecer akan mengakibatkan perubahan harga kurang dari 1% di tingkat petani. Apabila Elastisitas Transmisi Harga sama dengan 1, maka perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan mengakibatkan perubahan harga sebesar 1% di tingkat petani. Apabila Elastisitas Transmisi Harga lebih dari 1, maka perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer

mengakibatkan perubahan harga lebih besar dari 1% di tingkat pengecer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi dan Konsumsi Cabai

Secara umum posisi keseimbangan produksi dan konsumsi cabai dari provinsi contoh menunjukkan empat provinsi surplus dan dua provinsi defisit (Tabel 1). Surplus terbesar adalah Provinsi Jawa Barat yang cenderung meningkat dari 1,4 juta ton tahun 2012 menjadi 2,2 juta ton tahun 2015. Provinsi surplus lainnya relatif tidak terlalu besar (< 300 ribu ton) yaitu berturut-turut adalah Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Lampung. Provinsi yang defisit perbandingan produksi dan konsumsinya adalah Sumatera Selatan yang mencapai >10 ribu ton, sedang Riau hanya <10 ribu ton. Konsumsi cabai di setiap provinsi studi cenderung meningkat secara lambat, sementara produksi secara umum juga meningkat meskipun ada

kecenderungan berfluktuasi. Dalam kurun waktu 6 tahun ini produksi cabai cenderung meningkat di Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, tetapi di Lampung peningkatannya berfluktuasi.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa cabai dari provinsi surplus (Jawa Barat, Jawa tengah, Lampung, dan Sumatera Barat dikirim ke provinsi defisit seperti Sumatera Selatan dan Riau untuk memenuhi kebutuhan. Pada kenyataannya berdasarkan informasi alur perdagangan, produksi cabai dari Jawa Barat banyak dikirim juga ke provinsi surplus seperti Sumatera Barat, dimana cabai dari Jawa tersebut untuk dikirimkan lebih lanjut ke Provinsi Riau oleh bandar-bandar di kota Padang.

Hubungan antara Produksi dan Harga

Fluktuasi harga cabai sedikit banyak dipengaruhi oleh pasokan di pasaran, sedang pasokan sendiri sangat tergantung kepada produksi. Pada Gambar 2 dapat dilihat perkembangan produksi, harga bulanan cabai di

Tabel 1. Produksi dan konsumsi cabai di enam provinsi di Indonesia, 2010 - 2015

Provinsi	Tahun (ton)					
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1. Jawa Tengah						
– Produksi	168.411	167.794	145.037	130.127	119.130	134.572
– Konsumsi	11.449	113.642	112.766	112.786	110.662	109.777
– Selisih	156.962	54.152	32.271	17.341	8.468	24.795
2. Jawa Barat						
– Produksi	2.408.639	2.532.961	250.914	292.033	tad	tad
– Konsumsi	158.345	156.041	153.705	154.276	tad	tad
– Selisih	2.250.294	2.376.920	97.209	137.757	tad	tad
3. Lampung						
– Produksi	45.999	40.923	34.706	56.745	38.784	286.861
– Konsumsi	27.518	27.209	26.890	26.331	26.073	25.792
– Selisih	18.481	13.714	7.816	30.414	12.711	261.069
4. Sumatera Barat						
– Produksi	63.468	59.390	60.985	57.671	48.874	39.559
– Konsumsi	17.615	17.397	17.175	16.951	16.723	16.493
– Selisih	45.853	41.993	43.810	40.720	32.151	23.066
5. Riau						
– Produksi	11.956	15.608	15.509	15.906	15.832	11.943
– Konsumsi	21.508	20.979	20.453	9.687	19.412	18.775
– Selisih	-9.552	-5.371	-4.944	6.219	-3.580	-6.832
6. Sumatera Selatan						
– Produksi	13.440	13.971	15.109	18.058	14.137	10.850
– Konsumsi	27.297	26.922	26.539	26.108	25.742	25.257
– Selisih	-13.857	-12.951	-11.430	-8.050	-11.605	-14.407

Sumber: 1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2015 (data produksi)

2. Badan Ketahanan Pangan, 2015 (data konsumsi)

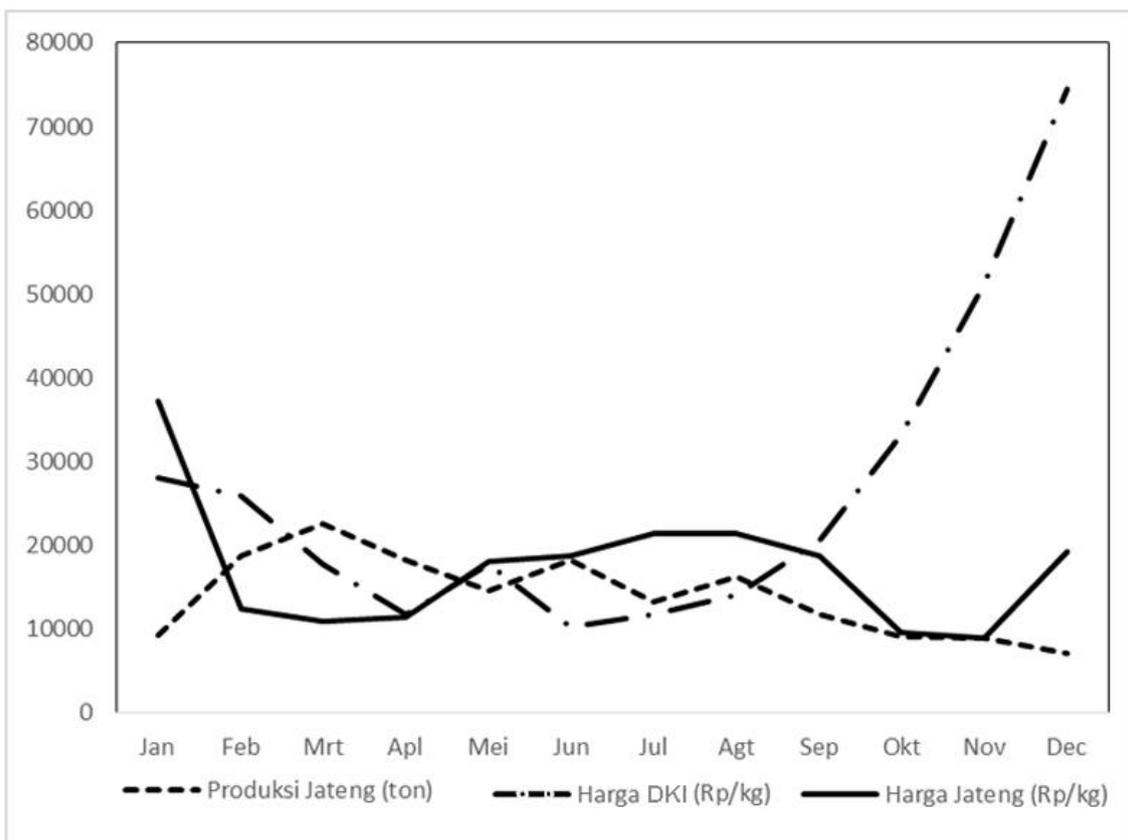
Keterangan: tad = tidak ada data

Jawa Tengah dan di DKI (Pasar Kramat Jati) pada tahun 2015. Pasar Kramat Jati di DKI dapat dianggap sebagai pusat perdagangan sayuran untuk konsumsi Jakarta dan bahkan disalurkan ke luar Jawa. Harga cabai tentunya sangat dipengaruhi oleh besarnya pasokan cabai yang masuk ke Pasar Kramat Jati atas pesanan bandar-bandar besar di Jakarta. Terlihat bahwa harga cabai di Jakarta tertinggi selama Desember-Februari dimana pada waktu itu produksi cabai di Jawa Barat dan Sumatera Barat menurun, bahkan produksi di Jawa Tengah berada pada titik terendah.

Jawa Barat dan Jawa Tengah selama ini merupakan sentra produksi yang memasok cabai ke DKI dan Sumatera. Walaupun produksi cabai di Sumatera Barat cukup tinggi namun masih menerima pasokan cabai dari Jawa Tengah untuk mencukupi kebutuhan pasar di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Alur pengiriman cabai antarpulau dari pelabuhan Semarang terjadi pada bulan-bulan Januari, Februari, Juni, November dan Desember dengan tujuan terutama ke Batam.

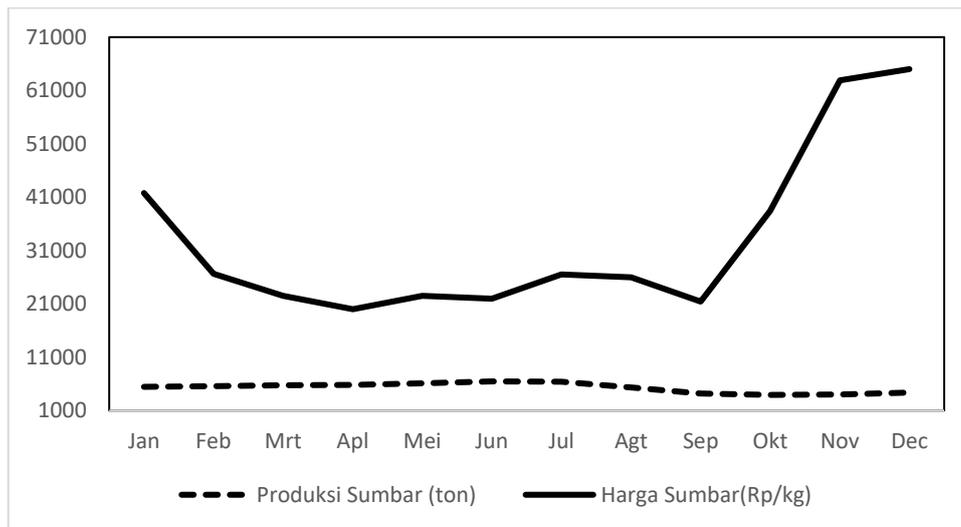
Harga cabai terendah di DKI terjadi pada bulan Juni sebesar Rp10.300 per kg, ini disebabkan pasokan yang cukup besar dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Selama periode 2012-2014 puncak panen cabai besar dan cabai rawit terjadi sekitar bulan Mei dan Juni (Kementan 2015). Pergerakan harga di Jakarta dan Jawa Tengah tampak tidak paralel karena ketika harga di Jakarta rendah, maka Jawa Tengah memasok cabai ke Sumatera Barat dan wilayah lainnya.

Perkembangan produksi dan harga cabai bulanan di Sumatera Barat tidak menunjukkan keterkaitan yang erat, walaupun ada kecenderungan harga meningkat pada saat produksi menurun (Gambar 3). Harga cabai terendah di Sumatera Barat terjadi pada bulan September, yaitu Rp21.450 per kg, ini dapat disebabkan oleh pasokan dari wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Selain itu, Sumatera Barat banyak melakukan impor cabai kering dan cabai tepung



Sumber: Kementan (2015), Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah (2016)

Gambar 2. Perkembangan produksi dan harga bulanan cabai besar di Jawa Tengah dan Jakarta, 2015



Sumber: Kementan (2015), Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3. Perkembangan produksi dan harga bulanan cabai besar di Sumatera Barat, 2015

dari Vietnam dan Thailand. Cabai impor tersebut dijual dengan cara dicampur dengan cabai lokal yang sudah digiling. Cabai yang sudah tiga hari tidak terjual akan digiling dan dicampur dengan cabai impor.

Berdasarkan data perkembangan harga dan produksi cabai di Jawa Barat terlihat bahwa fluktuasi harga bulanan selalu berlawanan dengan produksinya (Gambar 4). Harga cabai terendah terjadi paling pada bulan Juni-Agustus, yaitu pada pertengahan musim kemarau. Pada saat itu produksi tinggi sehingga pasokan cabai ke pasar melebihi dari permintaan sehingga berdampak kepada turunnya harga. Banyaknya stok cabai di pasar karena sebagian besar tanaman yang ditanam di sawah irigasi setelah padi. Harga cabai tertinggi terjadi antara bulan Desember 2015, yaitu Rp68.000 per kg pada saat tingkat produksi menurun.

Harga cabai selain dipengaruhi oleh faktor pasokan atau produksi juga secara tidak langsung oleh biaya produksi. Biaya usaha tani yang paling tinggi dalam budi daya cabai adalah pupuk dan pestisida yaitu lebih dari 60% dari biaya total usaha tani. Hasil cabai di sentra produksi Jawa Tengah (Magelang dan Temanggung) relatif lebih rendah berkisar 6,5 sampai 7,5 ton per hektare dibandingkan hasil cabai Jawa Barat (Garut) dan Sumatera Barat (kabupaten 50 Kota) yang mencapai lebih dari 9 ton per hektare (Tabel 2). Rendahnya hasil cabai Jawa Tengah disebabkan oleh serangan penyakit jamur dan virus kuning, sedangkan di Garut dan Kabupaten 40 Kota serangan penyakit termasuk ringan. Banyak petani di Jawa Tengah terpaksa memanen cabai yang masih hijau untuk

menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Akan tetapi walaupun hasil terlihat menurun di Jawa Tengah dengan harga ditingkatkan produsen yang membaik (Rp20.000/kg) petani masih mendapatkan keuntungan di Jawa maupun di Sumatera Barat (Rp22.000/kg) petani masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp64 juta sampai Rp71 juta per hektare semusim. Keuntungan usaha tani cabai di Garut dan Sumatera Barat jauh lebih tinggi berkisar Rp115 juta dan Rp154 juta semusim. Usaha tani ini cukup efisien dengan B/C mencapai 0,97 di Magelang dan sangat efisien dengan B/C ratio sebesar 2,8 di Sumatera Barat.

Hasil penelitian Hadi dan Susetyo 2012 mendapatkan hasil bahwa margin yang diterima petani di Jember sebesar 35,78% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir, sementara sebesar 64,22% adalah merupakan share margin pemasarannya. Dari total margin pemasaran tersebut, sebesar 27,40% merupakan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dan selanjutnya sebesar 36,82% adalah merupakan share margin pemasaran keuntungan yang diterima oleh para lembaga pemasaran yang terlibat.

Perkembangan Harga Cabai Merah

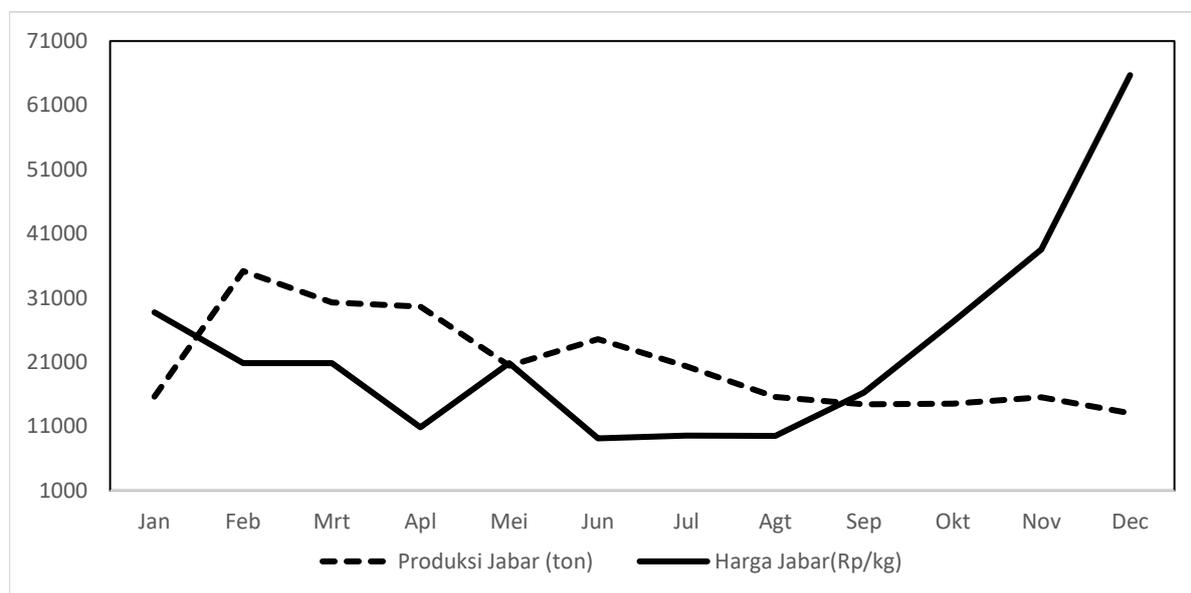
Produk pertanian yang sifatnya musiman akan selalu memunculkan fluktuasi harga. Hal ini menyebabkan cabai merah mendapat perhatian yang besar dari pemerintah karena harga berfluktuasi cukup besar bahkan seringkali berpengaruh terhadap inflasi. Lonjakan harga cabai sampai saat ini selalu terjadi hampir setiap

tahun walaupun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai program peningkatan produksi, seperti pengembangan areal cabai merah, sistem manajemen benih, pengaturan pola produksi, teknologi dan mekanisasi, perlindungan tanaman, penanganan pasca panen dan pengembangan rantai pasok (Pusdatin 2015).

Gambar 4 menunjukkan perubahan harga eceran cabai merah yang akhirnya ditransmisikan ke harga produsen. Tampak terjadi disparitas yang tinggi dalam perubahan harga. Kedua harga bergerak ke arah yang tidak sama, harga produsen bergerak lebih stabil dibandingkan dengan harga eceran. Coefficient

of Variation (CV) harga konsumen mencapai 12%, sementara CV harga produsen hanya 6%, selama periode Januari 2013-Desember 2015. Penjelasan ini terkait dengan fakta bahwa input pertanian hanya mewakili sebagian kecil dari harga produk akhir pangan dan fungsi dari rantai pangan.

Gambar 5 juga menunjukkan adanya transmisi harga yang asimetris di sepanjang rantai pasok dengan perubahan harga di tingkat produsen yang hanya sebagian ditransmisikan ke konsumen akhir. Sebaliknya, perubahan harga di tingkat konsumen tidak seluruhnya ditransmisikan ke harga produsen. Disparitas dalam variasi harga produsen dan harga



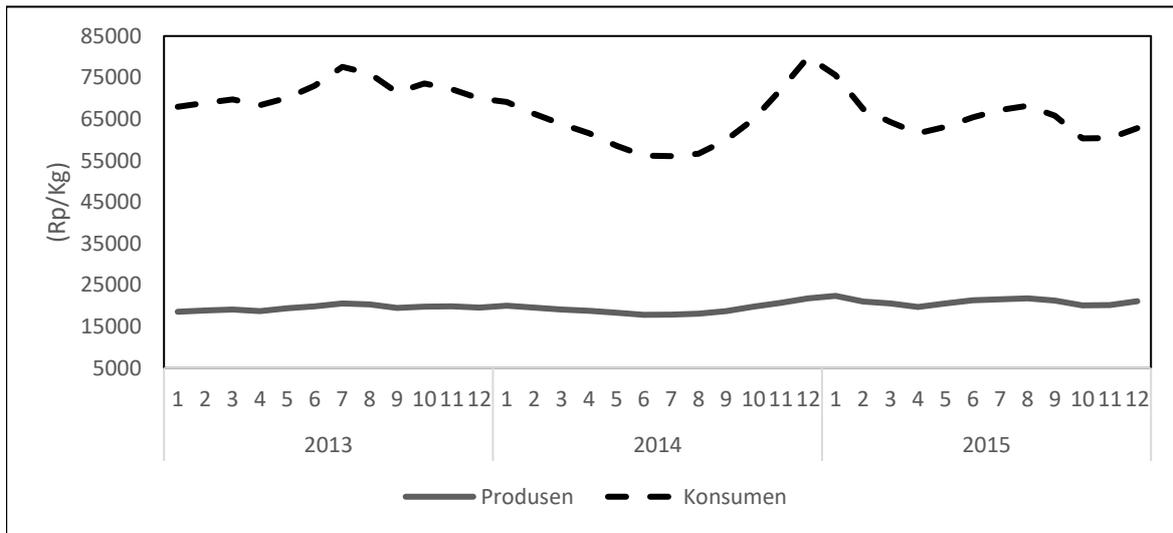
Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2016

Gambar 4. Perkembangan produksi dan harga bulanan cabai besar di Jawa Barat, 2015

Tabel 2. Analisis usaha tani cabai di sentra produksi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, 2016

No.	Uraian	Jawa Tengah		Jawa Barat	Sumatera Barat
		Magelang	Temanggung	Garut	50 Kota
A	Pendapatan Kotor				
	1. Hasil (ton/ha)	6,5	7,5	9,0	9,5
	2. Harga (Rp000/kg)	20,0	20,0	20,0	22,0
	3. Nilai hasil (Rp000)	130.000	150,0	180.000	209.000
B	Biaya produksi	66.000	71.000	65.000	55.000
	1. Sewa lahan	5.000	5.000	5.000	5.000
	2. Tenaga kerja	20.000	23.000	20.000	20.000
	3. Saprodi	41.000	43,400	40.000	30.000
C	Pendapatan bersih (Rp000)	64.000	79.000	115.000	154.000
D	B/C	0,97	1,1	1,76	2,8

Sumber: data primer, diolah

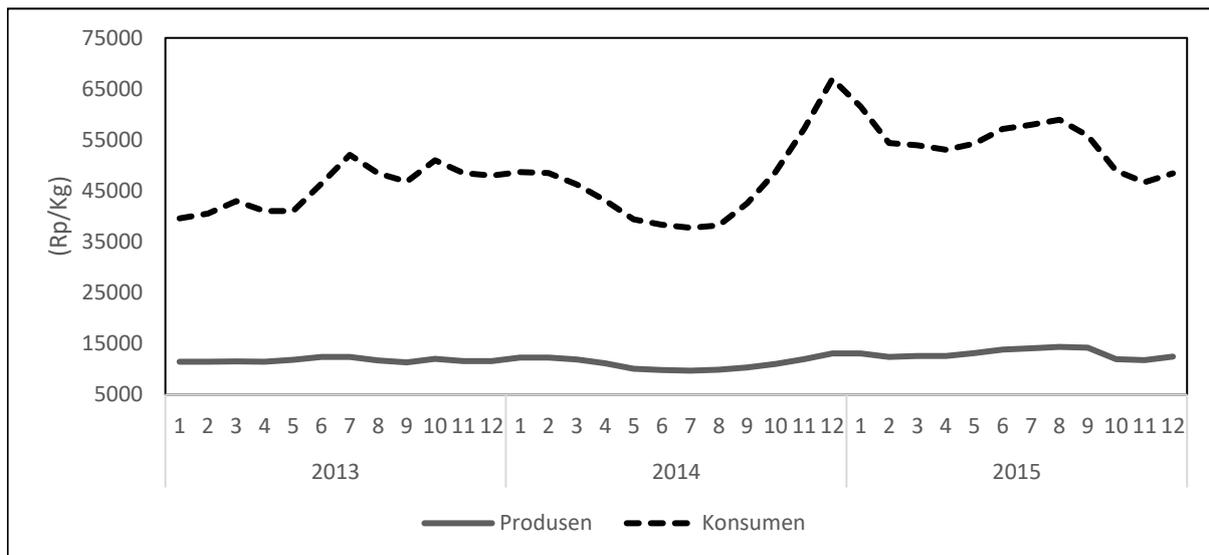


Gambar 5. Perkembangan harga cabai merah di tingkat produsen dan konsumen nasional, Januari 2013 - Desember 2015

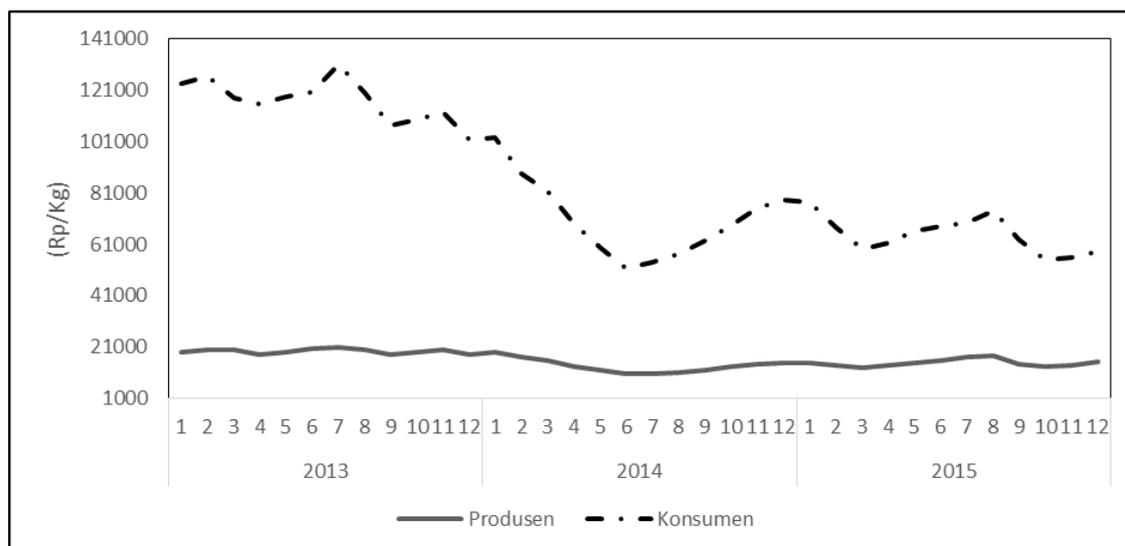
konsumen akan terkait dengan fungsi dari rantai pasok. Harga di tingkat produsen menunjukkan peningkatan sekitar 0,31%, sebaliknya harga di tingkat konsumen cenderung menurun dengan laju sekitar 0,61% per bulan selama periode Januari 2013-Desember 2015.

Gambar 6 menunjukkan perkembangan harga cabai merah di tingkat produsen dan konsumen Jawa Barat. Sama seperti di tingkat nasional, harga konsumen cabai merah di Jawa Barat lebih fluktuatif dibandingkan dengan harga di tingkat produsen dan mencapai harga tertinggi pada bulan Januari 2015, selama periode Januari 2013-Desember 2015. *Coefficient of*

Variation harga cabai merah di tingkat produsen dan konsumen, masing-masing sebesar 10% dan 17%. Namun beda dengan di tingkat nasional, harga cabai merah di Jawa Barat menunjukkan disparitas yang semakin besar antara harga konsumen dan produsen. Laju pertumbuhan harga produsen dan konsumen di Jawa Barat, masing-masing sekitar 0,40% dan 0,87% per bulan selama periode Januari 2013-Desember 2015. Perbedaan harga produsen dan konsumen berkisar 22–25%, yaitu terendah bulan Januari 2013 dan tertinggi bulan Desember 2014. Makin besar rasio produsen terhadap konsumen makin besar efisiensi perdagangannya.



Gambar 6. Perkembangan harga cabai merah di tingkat produsen dan konsumen Jawa Barat, 2013-2015



Gambar 7. Perkembangan harga cabai merah di tingkat produsen dan konsumen Sumatera Barat, 2013-2015

Perkembangan harga cabai merah di tingkat produsen dan konsumen Sumatera Barat disajikan pada Gambar 7. Sama seperti di tingkat nasional, harga konsumen cabai merah di Sumatera Barat lebih fluktuatif dibandingkan dengan harga di tingkat produsen, namun harga cabai merah di Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan yang menurun, yaitu 1,14% dan 2,83% per bulan selama periode Januari 2013-Desember 2015, masing-masing untuk harga produsen dan konsumen. Hal ini, diduga antara lain dipengaruhi oleh rendahnya harga cabai merah di Provinsi DIY. Rata-rata transaksi cabai merah di Kota Padang sebagian besar adalah cabai Jawa. Cabai ini berasal dari Pasar Muntilan DIY dengan jumlah rata-rata lebih kurang 22,5 ton per hari. Pergerakan harga cabai merah di Kota Padang sangat terkait dengan tingkat harga cabai merah dan pasokan cabai merah di Pulau Jawa khususnya DIY serta keterlambatan dalam proses pengiriman. Konsumen cabai merah di Kota Padang lebih menyukai cabai Jawa, daripada cabai lokal.

Ketersediaan pasokan cabai merah yang berasal dari Jawa menjadi sangat penting bagi stabilitas harga cabai merah di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Laju peningkatan harga produsen dan harga konsumen di DIY masing-masing hanya 0,18% dan 0,35% per bulan selama periode Januari 2013-Desember 2015. Sementara rata-rata harga produsen dan harga konsumen sekitar Rp12.229/kg dan Rp39.073/kg selama periode Januari 2013-Desember 2015.

Coefficient of Variation harga cabai merah di tingkat produsen dan konsumen, masing-masing

sebesar 19% dan 34%. Namun berbeda dengan di tingkat nasional dan Jawa Barat, harga cabai merah di Sumatera Barat menunjukkan disparitas yang semakin kecil antara harga konsumen dan produsen, selama periode Januari 2013-Desember 2015.

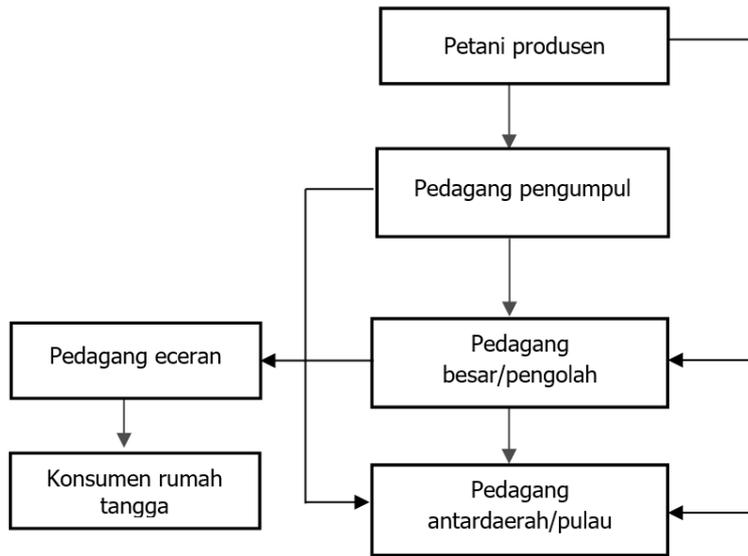
Tata Niaga Cabai Merah

Rantai tata niaga cabai merah di Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dapat dilihat di Gambar 8. Dalam memasarkan hasil produksi cabai merah, petani mempunyai tiga alternatif saluran distribusi. Petani dapat menjual cabai merah kepada pedagang pengumpul di desa, kepada pedagang besar di pasar, atau kepada pedagang antardaerah melalui perantara/caloe. Pedagang pengumpul mempunyai kebebasan menjual cabai merah ke pedagang besar atau pedagang antardaerah. Pedagang antardaerah merupakan pedagang besar yang memiliki jaringan pasar yang luas baik di pasar lokal kabupaten maupun kabupaten dan provinsi lain. Pedagang besar menjual cabai merah kepada pedagang eceran dan pedagang antardaerah. Pedagang besar di Kota Padang mengolah cabai merah dari Pulau Jawa yang tidak terjual dalam tiga hari. Hal ini dilakukan karena jika sudah lebih dari tiga hari cabai merah dari pulau Jawa akan mulai membusuk. Pedagang eceran merupakan rantai pemasaran terakhir yang berhadapan langsung dengan konsumen rumah tangga.

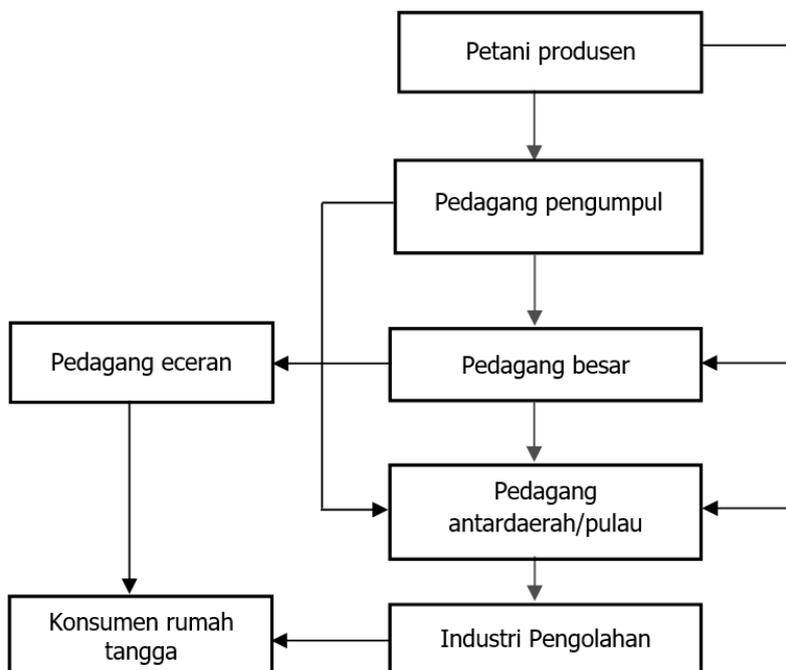
Secara garis besar rantai tata niaga cabai merah di Kabupaten Garut dan Cianjur, Jawa Barat dapat dilihat di Gambar 9. Dalam memasarkan hasil produksi cabai merah, petani

mempunyai tiga alternatif saluran distribusi. Petani dapat menjual cabai merah kepada pedagang pengumpul di desa, kepada pedagang besar atau kepada pedagang antarwilayah melalui perantara. Pedagang pengumpul mempunyai kebebasan menjual cabai merah ke pedagang besar atau pedagang antarwilayah. Pedagang antarwilayah merupakan pedagang besar yang memiliki jaringan pasar sampai ke

kabupaten, provinsi, pulau lain. Selain menjual cabai merah ke daerah lain, pedagang antardaerah juga memasok cabai merah ke industri pengolahan, seperti Indofood. Pedagang besar menjual cabai merah kepada pedagang eceran dan pedagang antarwilayah. Pedagang eceran dan industri pengolahan merupakan rantai pemasaran terakhir yang berhadapan langsung dengan konsumen rumah tangga.



Gambar 8. Rantai tata niaga cabai merah di Provinsi Sumatera Barat, 2016



Gambar 9. Rantai tata niaga cabai merah di Provinsi Jawa Barat

Perdagangan Antarpulau

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah potensial cabai merah. Wilayah sumber produksi cabai merah di Sumatera Barat terletak di Kabupaten Solok, Agam, Tanah Datar, Payakumbuh, dan Bukittinggi. Bila dilihat dari perkembangan luas tanam dan produksi cabai pada tahun 2013 dan 2014 ditingkat kabupaten, nampak ada penurunan kecuali pada kabupaten Payakumbuh dan Bukittinggi yang perkembangannya meningkat secara signifikan.

Jumlah cabai yang keluar dan masuk ke Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5. Jenis cabai yang diidentifikasi terdiri dari cabai hijau, cabai merah besar, cabai merah keriting dan cabai rawit. Total pengiriman cabai keluar Provinsi Sumatera Barat mencapai 18.997.588 kg setahun. Pengiriman cabai ke luar provinsi, terbesar ke Provinsi Riau, yaitu sebanyak 17.706.168 kg, dan dalam jumlah lebih sedikit dikirim ke Jambi, DKI, DIY, Sumsel, dan Sumut (BKP 2014).

Selain sebagai daerah produsen cabai merah, Provinsi Sumatera Barat juga memasukkan cabai dari provinsi lain dengan total mencapai 16.848.800 kg setahun. Pengiriman terbesar dari Jawa Tengah mencapai 11.245.200 kg sedang DKI sebanyak 2.370.000 kg, dan DIY sebanyak 1.780.000 kg. Cabai merah keriting paling banyak dikirim keluar masuk Sumatera Barat. Terlihat bahwa DKI dan DIY selain mengirim juga menerima cabai dari dan ke Sumatera Barat, tergantung ketersediaan dan permintaan wilayah.

Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa cabai yang keluar Provinsi Sumatera Barat lebih besar dari cabai yang masuk, yang berarti bahwa Sumatera Barat mengirim cabai ke provinsi sekitarnya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari luar.

Meskipun Sumatera Barat merupakan sentra produksi cabai merah, namun pedagang cabai di Sumatera Barat juga membeli cabai dari luar provinsi. Dari Tabel 6 nampak bahwa jumlah cabai yang masuk ke Sumatera Barat melalui JTO (jembatan timbang) sangat fluktuatif.

Tabel 4. Komoditas cabai yang keluar Provinsi Sumatera Barat, 2014 (kg)

Komoditas	Sumut	Riau	Jambi	Sumsel	DIY	DKI	Jumlah
Cabai hijau		1.248.860	31.200	15.600			1.295.660
Cabai merah besar	67.600	2.250.340	226.200		286.000	234.000	3.064.140
Cabai merah keriting	36.400	14.019.808	231.400	104.000			14.391.608
Cabai rawit		187.160	47.580	11.440			246.180
jumlah	104.000	17.706.168	536.380	131.040	286.000	234.000	18.997.588

Sumber: BKP Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2014 (Diolah)

Tabel 5. Komoditas cabai yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat, 2014

Provinsi asal	Cabai merah besar (kg)	Cabai merah keriting (kg)	Cabai rawit (kg)	Jumlah (kg)
Sumut		3.000		3.000
Jambi		88.400		88.400
Sumsel		52.000	31.200	83.200
Bengkulu		546.000		546.000
Lampung	36.000			36.000
DKI Jakarta	442.000	1.928.000		2.370.000
Jabar		720.000		720.000
Jateng	1.998.000	9.246.200		11.245.200
DI Yogyakarta	416.000	674.000		1.780.000
Jatim	364.000			364.000
Banten		312.000		312.000
Jumlah (kg)	3.256.000	13.569.600	31.200	16.848.800
Persen (%)	19,3	80,5	0,2	100,0

Sumber: BKP Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat (2014), diolah

Pada tahun 2011 jumlah cabai yang masuk dari provinsi lain relatif kecil, sementara pada 2015 jumlah cabai yang masuk meningkat tajam. Bila dilihat dari fluktuasi bulanan tidak nampak kecenderungan adanya *peak season*, meskipun terdapat kecenderungan bahwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus (kecuali bulan Juli) arus distribusi cabai yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat sangat banyak. Cabai yang keluar dari Sumatera Barat melalui JTO (Tabel 7) menandakan bahwa produksi cabai masih belum memenuhi permintaan pedagang besar antarpulau di Padang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat konsumen cabai merah di Padang banyak yang menyukai cabai dari Jawa, karena rasa yang tidak terlalu pedas dan harganya juga relatif murah. Hasil pemeriksaan JTO (jembatan timbang) cabai produksi Sumatera Barat dikirim ke Riau, Sumatera Utara dan Jambi dalam jumlah terus

meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah cabai yang keluar masuk provinsi Sumatera Barat melalui JTO terlihat jauh lebih kecil dibanding realitanya (Tabel 4 dan 5) yang mana ini menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh JTO masih kurang efektif. Perkembangan jalan tidak diikuti oleh jumlah JTO sehingga banyak kendaraan pengangkut yang tidak termonitor. Selain itu JTO hanya memonitor kendaraan truk besar sedang kendaraan pick up yang kecil bebas dari pemeriksaan.

Survei terhadap permintaan cabai merah di Kota Padang menunjukkan bahwa pola distribusi cabai merah di Sumatera Barat cukup panjang. Terdapat banyak pelaku yang terlibat mulai dari produsen, pengepul/pedagang pengumpul, pedagang besar, grosir, bandar, pengecer, hingga konsumen. Meskipun rantai perdagangan cukup panjang dan melibatkan banyak pihak,

Tabel 6. Komoditas cabai yang masuk ke Sumatera Barat melalui JTO, 2010-2015 (ton)

Bulan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	766	415	621	486	452	529
Februari	575	492	566	613	555	754
Maret	742	382	684	588	533	909
April	830	544	792	588	491	622
Mei	960	840	813	1.052	867	1.212
Juni	501	255	819	757	869	1.275
Juli	264	178	762	810	750	451
Agustus	426	177	353	402	621	1.127
September	300	183	900	524	524	743
Oktober	702	744	915	637	522	746
November	671	837	988	444	593	727
Desember	689	543	695	432	393	541
Total	7.426	5.590	8.908	7.333	7.170	9.636

Sumber: Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat (2016), diolah

Tabel 7. Komoditas cabai yang keluar dari Sumatera Barat melalui JTO, 2010-2015 (ton)

Bulan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	147	142	118	118	162	234
Februari	162	142	76	76	55	310
Maret	144	175	170	170	100	490
April	214	175	106	106	89	283
Mei	208	174	156	156	127	230
Juni	157	90	153	153	250	198
Juli	167	143	139	139	192	75
Agustus	179	139	100	100	195	205
September	109	166	100	100	322	282
Oktober	160	306	136	136	280	286
November	144	340	144	144	130	252
Desember	194	407	126	126	108	199
Total	1.985	2.399	1.524	1.524	2.010	3.044

Sumber: Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat (2016), diolah

namun hubungannya bersifat fleksibel. Cabai merah yang dipasarkan di Padang kebanyakan berasal dari Jawa (DIY dan Brebes). Sementara para pengepul yang berlokasi di daerah Alahan Panjang justru mendistribusikan cabainya ke luar daerah Sumatera Barat, seperti Pekanbaru. Pergerakan harga cabai merah di Kota Padang sangat terkait dengan tingkat harga cabai merah dan pasokan cabai merah di Pulau Jawa khususnya DIY serta keterlambatan dalam proses pengiriman.

Lebih lanjut hasil survei tersebut menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap cabai merah bersifat tidak responsif terhadap kenaikan harga. Dengan demikian permintaan cabai merah bukan merupakan sasaran kebijakan untuk menstabilkan harga di pasar. Agar stabilitas harga cabai merah di Padang dapat tercapai, dan hasilnya tentunya bisa membantu stabilitas tingkat inflasi di Kota Padang, maka peranan pasokan cabai merah di Kota Padang menjadi sangat penting. Stabilitas pasokan cabai merah di Kota Padang yang paling penting adalah stabilnya pasokan cabai merah dari Jawa yang merupakan 70% dari total konsumsi cabai merah di Kota Padang. Selanjutnya cabai merah produksi lokal memiliki kontribusi 30% dari konsumsi cabai merah masyarakat Kota Padang. Berdasarkan kondisi tersebut, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah menjamin ketersediaan pasokan cabai merah dari Jawa khususnya terkait dengan kemudahan distribusi dari daerah asal produksi ke pasar di Kota Padang.

Alur distribusi perdagangan cabai wilayah Jawa Barat dengan mengambil contoh di Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu sentra produsen cabai mendapat pasokan dari Garut sebesar 60% dari jumlah yang

diperdagangkan, 40% sisanya berasal dari petani langsung. Sebagian besar pembelian berdasarkan pesanan (55%) sedang yang membeli secara langsung sekitar 40%. Cara pembelian dengan dikirim secara rutin boleh dikatakan sudah tidak ada. Sasaran penjualan cabai oleh pedagang masih dominan di dalam kabupaten, yaitu yang melalui pedagang 60% sedang 25% dijual ke konsumen langsung. Jumlah cabai yang sasarannya dijual ke luar kabupaten hanya sekitar 15%.

Perdagangan cabai antarpulau di Jawa Barat dapat mengambil kasus dari kabupaten Garut yang dalam hal ini melalui stasiun agribisnis (STA) yang sudah dibangun sejak tahun 2012. STA Bayombong di Garut merupakan terminal agribisnis cabai terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan data tahun 2015 -2016 pelaku perdagangan antarpulau bisa dilakukan oleh STA ataupun oleh pihak lainnya secara perorangan atau kelompok (Tabel 8). Tujuan penjualan kebanyakan ke Provinsi Lampung, tetapi tahun lalu pengiriman sampai ke Palembang dan Batam. Berkurangnya pengiriman jarak jauh seperti Batam kecuali disebabkan biaya transportasi cukup mahal juga cabai sekarang bisa di kirim dari provinsi yang surplus seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Jumlah pengiriman cabai antarpulau yang tidak terlalu besar (maksimal 6 kuintal) karena pesanan dalam satu truk pengangkut memuat banyak jenis sayuran lainnya.

Kebijakan Perdagangan Pemerintah

Kebijakan terkait upaya stabilisasi harga komoditas di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU RI No. 7

Tabel 8. Perdagangan cabai antarpulau melalui STA Bayombong Garut, 2015–2016

Tanggal	Volume (kuintal)	Harga penjual (Rp000)	Tujuan penjualan
Juni 2015	4		Batam
Desember 2015	5	20	Palembang
Januari 2016	4,95	13	Lampung
Februari 2016	2,9	33	Lampung
	0,25	25	Lampung
Februari-2016	1,0	19	Lampung
	1,0	25	Lampung
	1,3	29	Lampung
Maret 2016	6,0	29,5	Lampung
	6,0	26,200	Lampung

Sumber: Data/informasi primer, diolah

Tahun 2014 tentang perdagangan. UU RI No. 18 tentang pangan menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengelola cadangan pangan, dan distribusinya untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. UU RI No. 7 menyatakan pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.

Pasal 51 dalam UU Pangan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban mengatur perdagangan pangan yang bertujuan untuk: (1) stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok; (2) manajemen cadangan pangan; dan (3) penciptaan iklim usaha pangan yang sehat. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menetapkan jenis barang kebutuhan pokok termasuk cabai. Untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang, ada larangan buat pelaku usaha melakukan penimbunan atau penyimpanan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Sejauh ini belum ada sanksi yang tegas terhadap penimbunan dan penyimpanan barang produk hortikultura khususnya cabai yang relatif mudah rusak. Umumnya pedagang besar cabai langsung mengangkut barang sesuai pesanan dan tidak ada pembatasan jumlah pengiriman. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dilakukan melalui: (1) Penetapan harga pada tingkat produsen; (2) Penetapan harga pada tingkat konsumen; (3) Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan; (4) Pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; (5) Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif; (6) Pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau (7) Pengaturan ekspor pangan dan impor pangan.

Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 Pengawasan kegiatan perdagangan termasuk dalam hal ini kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Peraturan Menteri Perdagangan Menindak Lanjuti Perpres Nomor 71 Tahun 2015. Pemerintah daerah dapat menentukan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi sejauh ini belum ada contoh Pemda yang menerapkan kebijakan harga minimum untuk komoditas pertanian. Menteri menetapkan kebijakan harga,

pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Antriyandarti dan Ani (2015) dalam tulisannya tentang pengembangan agribisnis cabai merah di Kabupaten Magelang memberikan saran perlunya regulasi penataan dan perlindungan harga produk cabai merah. Meskipun pemerintah telah memberikan perlindungan di sektor input, tetapi secara keseluruhan perlindungan yang diberikan belum memadai. Untuk itu perlu antara lain melalui perbaikan infrastruktur agribisnis cabai merah.

Pelaksanaan kebijakan harga di Indonesia masih memiliki kelemahan baik dalam hal koordinasi maupun aransemen kelembagaan. Salah satunya pelanggaran/sanksi dalam pelaksanaan kebijakan harga di Indonesia masih lemah, sehingga perlu adanya *law enforcement*. Kondisi empiris menunjukkan bahwa selama ini masih ada kelemahan dalam hal instrumen kebijakan, infrastruktur serta kelembagaan pendukung. Contohnya infrastruktur pendukung sistem logistik belum memadai, kelembagaan pendukung produksi belum terbentuk dengan baik akibat struktur pertanian yang tidak terkonsolidasi.

Kementerian Perdagangan telah berupaya memfasilitasi perdagangan komoditas cabai antara daerah yang defisit agar bisa terkoneksi dan melakukan transaksi langsung ke daerah yang surplus. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yaitu peluncuran perdana program perdagangan komoditas antardaerah/antarpulau yang dilakukan di sentra produksi cabai Kecamatan Selabintana-Sukabumi Jawa Barat, Rabu 8 Juli 2015. Transaksi ini diharapkan bisa menekan disparitas harga cabai antardaerah dan menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit. Mendag dengan dukungan Pemda terus mendorong para pelaku usaha dan petani agar tidak terpaku dengan perdagangan regional saja.

Anwarudin et al. (2016) mengemukakan bahwa pada musim hujan produksi cabai biasanya selalu rendah karena sebagian besar sawah ditanami padi, dan di lahan kering banyak petani yang enggan menanam cabai karena risiko gagal panen tinggi, biaya produksi tinggi terutama untuk pestisida, dan produktivitasnya lebih rendah daripada di musim kemarau. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi gejala harga cabai, yaitu peningkatan luas tanam cabai

pada musim hujan, pengaturan luas tanam dan produksi cabai pada musim kemarau, stabilisasi harga cabai, dan pengembangan kelembagaan kemitraan yang andal dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian juga telah membuat terobosan untuk mengembangkan cabai di luar musim (*off season*) yang dilengkapi dengan pompa air dan irigasi tetes, serta dipusatkan di Jawa Barat dan Banten. Program ini diharapkan akan mampu memasok kebutuhan cabai seJabodetabek secara berkelanjutan. Pertimbangan geospasial dan waktu tanam kembangkan di sekitar Jabodetabek mengingat karakteristik cabai yang mudah rusak (*perishable*) dan konsumen menghendaki cabai segar, sehingga cabai harus dipanen setiap pagi hari dan sore harinya sudah masuk ke pasar. Pengembangan cabai besar dalam tahun 2016 seluas 152 ribu ha dan cabai rawit 188 ribu ha dengan perkiraan produksi 1,2 juta ton dan 940 ribu ton, tersebar di sentra produksi di Pulau Jawa sebesar 51%; Sumatera 17%, Sulawesi 4% dan sisanya di wilayah lainnya.

Kebutuhan pasokan cabai di delapan kota besar di Indonesia adalah 48% dari total kebutuhan konsumsi nasional cabai merah besar; dan 24,8% cabai rawit, sehingga untuk keperluan tersebut lokasi pengembangan sentra produksi diarahkan berdekatan dari pusat kota besar. Guna memenuhi kebutuhan cabai di seluruh Indonesia sekitar 150 ribu ton per hari Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) bersepakat dengan petani, Kepala Desa dan Camat bersama penyuluh untuk menata pola tanam cabai setiap harinya, sehingga ada kalender tanam cabai di sentra cabai level desa, kecamatan, maupun kabupaten yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya, pemerintah harus selalu berupaya mendorong agar swasta berinvestasi untuk pengembangan cabai dan bawang merah dengan sistem *contract farming*. Ide tersebut cukup bagus tapi sejauh ini belum ada laporan pelaksanaannya. Pengembangan program tersebut perlu dibangun mulai dari masyarakat (partisipatif), kalau program dipaksakan tanpa memerhatikan kelayakannya niscaya tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Sumatera Barat sebagai provinsi produsen dan konsumen, berdasarkan SK Gubernur membangun 8 kawasan pengembangan cabai yaitu Kabupaten Agam, 50 Kota, Solok, Padang Pariaman, Paya kumbuh, Tanah Datar, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan. Kebijakan program pengembangan tersebut dilaksanakan karena selama ini Sumatera Barat mendapat kiriman cabai merah dari wilayah Jawa Tengah dan Lampung dapat mencapai sampai 24 ton per hari,

terutama saat produksi cabai lokal kurang untuk memenuhi kebutuhan. Sebetulnya produksi cabai Sumatera Barat melebihi konsumsinya (surplus) tetapi cabai dari Jawa Tengah didatangkan terutama untuk dikirim ke provinsi lain seperti Pekanbaru, Batam dan lainnya. Cabai didatangkan dari Jawa Tengah melalui darat menggunakan truk, namun tidak melalui pelabuhan Teluk Bayur.

Jembatan Timbang yang mencatat keluar masuknya hasil pertanian termasuk cabai terakhir dicatat pada tahun 2014. Kendala dalam pelaksanaan jembatan timbang antara lain letaknya yang tidak pas, yaitu di perbatasan, banyak mobil *pick up* atau pribadi yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, sehingga tidak termonitor oleh jembatan timbang. Selain itu penjaga jembatan timbang tidak akan efektif jika tidak difasilitasi dengan baik, selain itu juga jumlah petugas yang relatif sedikit.

Beberapa pasar induk (PI) yang menampung hasil cabai dari Jawa Barat adalah: PI Kramat Jati (Jakarta), PI Caringin dan PI Gede Bage (Bandung), PI Tanah Tinggi. Produksi cabai dari Jawa Barat menurut Dinas Pertanian setempat diperkirakan 80 % untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi, sedangkan 20% dikirim ke pasar Induk Kramatjati atau diperdagangkan antarpulau. Cabai keriting diperdagangkan sampai ke Lampung, Bangka Belitung, Padang, Pontianak, Batam. Sebagian petani ada yang produksi cabai paprika untuk dijual ke pasar modern, bahkan sampai diekspor.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pemasaran petani cabai salah satunya adalah dengan membangun stasiun agribisnis (STA). Di Jawa Barat terdapat enam STA yaitu di Garut, Cianjur, Ciamis, Sukabumi, Bandung, dan Tasikmalaya. Fungsi STA bisa membeli produk sayuran dari petani, dan juga menjadi terminal/tempat menyimpan sementara, melakukan sortir sayuran yang akan dikirim ke pasar/luar daerah. Tidak ada standar tarif resmi untuk jasa tempat/gudang tergantung kesepakatan antara pengelola STA dengan pedagang yang bersangkutan. Harga hasil sayuran biasanya ditetapkan oleh pedagang besar sebagai pemesan, kemudian STA menyesuaikan harga pembelian di tingkat petani. Sering terjadi permintaan barang dari pedagang luar tidak bisa dipenuhi karena harga yang diminta lebih rendah dari harga pasaran setempat.

Pemerintah juga sudah membangun tiga stasiun agropolitan (STA) untuk sayuran di kabupaten Magelang, yaitu di STA Sewukan, Ngablak dan Kaliangke. STA Kaliangke masih

relatif baru, belum berkembang seperti STA lainnya. Hasil sayuran dibeli langsung dari sawah oleh pedagang pengumpul dengan kendaraan pengangkut yang kecil seperti pick up, kemudian dibawa ke pedagang besar yang sudah siap dengan truk-truk pengangkut. Begitu selesai transaksi jual beli dan hasil sayuran dipindah ke dalam truk, lalu sayuran diantar ke daerah, bisa ke pasar besar luar kota ataupun luar Jawa. Petani yang produksi sayurannya cukup banyak juga bisa langsung bertransaksi dengan pedagang di STA, sedangkan petani kecil tinggal menunggu pedagang pengumpul mengambil hasil panen.

Fungsi STA yang dibangun oleh pemerintah dinilai kurang efektif dilihat dari masih rendahnya permintaan barang melalui STA, begitu juga pemanfaatan gudang dan fasilitas pengeringan masih jauh dari kapasitasnya. Faktor yang menyebabkan STA kurang berfungsi adalah karena pedagang dan petani pelaku pemasaran sudah mempunyai hubungan langsung dengan pembeli di lain wilayah maupun provinsi. STA tidak mempunyai modal dasar yang kuat dan tidak mempunyai kelembagaan keuangan seperti koperasi, sehingga bangunan dan fasilitas yang ada kurang terpelihara dan terus menerus mengalami penyusutan. Selain itu pengelola STA umumnya juga pedagang antarpulau atau perantara yang lebih tertarik untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dan lebih mementingkan kebutuhannya dibanding mengembangkan STA nya sendiri. Tidak jelasnya ketentuan tarif gudang dan pemanfaatan fasilitas STA karena pemanfaatannya cenderung untuk kepentingan pribadi.

Permintaan cabai akhir-akhir ini dari perusahaan seperti Indofood dan ABC meningkat, yang berdampak juga pada kenaikan harga cabai di pasar lokal. Permintaan cabai ke STA yang rutin adalah dari Lampung, Palembang dan Batam. Pengadaan cabai oleh STA diambil dari petani 50%, pedagang pengumpul 25%, dan perantara 25%.

Produksi cabai dari Kabupaten Cianjur kebanyakan dipasarkan hanya sampai Pasar Induk Kramat Jati. Jarang sekali ada pedagang antarpulau dari Cianjur yang langsung memasarkan cabai ke luar Pulau Jawa. Dinas Pertanian menganjurkan agar penanaman cabai tidak monokultur tapi tumpang sari dengan sayuran lain seperti kubis, tomat, sawi dan lainnya. Sentra produksi cabai di Cianjur antara lain di Pacet, Cipanas, dan Cianjur Selatan. Selain itu Dinas Pertanian sudah mensosialisasikan pengaturan jadwal tanam

dengan kelompok-kelompok tani dan mendapat respons yang positif. Diharapkan dengan penerapan jadwal tanam tersebut produksi cabai lebih merata sepanjang tahun. Pemerintah daerah telah memfasilitasi banyak alternatif pasar tradisional baik di wilayah kabupaten maupun di luar.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan, sudah ada MOU antara petani cabai dengan pedagang besar di pasar Johar Semarang. Sebagai upaya stabilisasi harga cabai di Jakarta, selama tahun 2016 ini sudah empat kali dilakukan pembelian cabai dari petani langsung oleh pemerintah pusat untuk operasi pasar, yaitu pada bulan Mei, Juni dan Juli 2016. Jumlah setiap pembelian berkisar 0,97 sampai 1,3 ton dengan harga sekitar Rp2.000/kg. Dibalik kebijakan itu petani mengeluh karena pemerintah membeli cabai langsung dengan harga lebih rendah dari pasaran.

Kemitraan antara petani (dalam hal ini diwakili PT Wulung) dan perusahaan makanan (PT Indofood) telah terjalin dalam bentuk MOU. Namun, pada kenyataannya tetap hasil petani dibeli oleh pedagang perantara atau pengumpul, selanjutnya pengumpul mengirimkan ke pedagang yang mendapatkan kontrak kerja dengan PT Indofood. Masalah harga ditentukan oleh PT Indofood dalam bentuk kontrak mingguan.

Program pengembangan cabai oleh dinas Pertanian antara lain pembinaan terhadap 12 kelompok tani di Kabupaten Temanggung. Menurut informasi dari dinas Perdagangan Temanggung, sudah ada program UMKM yang bergerak dalam pengolahan cabai kering. Cabai kualitas rendah ditampung oleh pengusaha pengolahan untuk dikeringkan dan dibuat cabai bubuk.

Sebagai upaya untuk meningkatkan harga cabai di tingkat petani Dinas Perdagangan telah membangun pasar lelang di Ngadirejo. Petugas memonitor terus harga cabai di pasar-pasar besar seperti Kramat Jati agar dapat memutuskan pasar tujuan. Pemerintah Jawa Tengah juga telah menginisiasi pasar lelang yang cukup besar tiap bulan di Semarang dan Yogyakarta. Biasanya pengangkutan cabai dan sayuran lainnya dilakukan dalam waktu malam hari dan sejauh ini fasilitas kendaraan pengangkut barang keluar kota belum mencukupi kebutuhan. Pemasaran cabai sudah diarahkan ke pasar modern di mana petani maju sudah melakukan MOU dengan rumah makan, hotel dan swalayan yang membuat ketentuan terkait dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pengiriman cabai.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Stabilisasi produksi cabai merah di Pulau Jawa dan Sumatera Barat sangat menentukan stabilitas harga di wilayah lain, terutama di wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Produksi cabai di Sumatera Barat walaupun surplus masih belum memenuhi permintaan dari provinsi sekitarnya. sehingga perlu mengimpor dari Jawa. Arus distribusi cabai dari DIY dan Jawa Tengah yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat pada bulan Mei sampai dengan Agustus (kecuali bulan Juli) dan tidak nampak adanya *peak season*. Pengiriman cabai dari Sumatera Barat terutama ke Provinsi Riau terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya untuk cabai merah keriting.

Upaya Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk stabilisasi harga cabai merah, menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil disparitas harga antardaerah sejauh ini banyak mengalami kendala antara lain rendahnya produksi sehingga permintaan kurang terpenuhi dan tingginya biaya transportasi pengangkutan.

Upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian dengan membangun stasiun agribisnis (STA) di beberapa sentra produksi cabai, antara lain di Jawa Barat, belum efektif menampung dan memasarkan hasil petani keluar wilayah dengan harga yang layak karena petani cabai sebagian besar sudah dikuasai oleh pedagang-pedagang besar yang berkemampuan melakukan perdagangan antarwilayah.

Produksi cabai perlu ditingkatkan jumlah maupun kontinuitasnya, karena sangat besar pengaruhnya terhadap pasokan, permintaan pasar dan harga. Upaya pengembangan cabai di luar musim (*off season*) masih memungkinkan apabila dilengkapi dengan pompa air dan irigasi tetes.

Hasil analisis efek kausal dan identifikasi pasar dominan yang menjadi penentu harga di pasar lain, serta dinamika jangka pendek pasar beras cabai merah menunjukkan adanya kecenderungan yang umum yang menentukan harga komoditas. Hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan harga antarpasar untuk cabai merah dengan derajat integrasi pasar yang relatif sempurna.

Terkait dengan dinamika jangka pendek, terbukti bahwa harga cabai merah besar di pasar

Semarang masih menjadi penjelas harga di pasar lainnya. Harga cabai merah keriting di pasar Padang juga terbukti secara signifikan menjelaskan variasi harga cabai merah keriting di pasar lain.

Secara umum beberapa faktor yang menjadikan harga komoditas pertanian di tingkat produsen tertekan adalah karena meningkatnya biaya produksi, informasi yang tidak asimetri dan rendahnya daya tawar dengan pelaku pemasaran di sepanjang rantai pasok

Implikasi Kebijakan

Perlu diupayakan peningkatan dan stabilisasi produksi cabai merah di Pulau Jawa karena harga di Jawa sangat menentukan harga di wilayah lain, terutama di wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, menjaga produksi cabai merah keriting di Sumatera Barat perlu selalu diupayakan agar harganya selalu stabil.

Koordinasi vertikal dan kontrak pemasaran dapat digunakan sebagai alat manajemen risiko pendapatan dan harga karena ada ketentuan harga jual bagi petani. Selain itu, rendahnya harga dan fluktuasi harga di tingkat petani disebabkan oleh beragamnya kualitas produk yang dihasilkan oleh petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Analisis Kebijakan Pertanian yang telah memberikan saran dan masukan untuk naskah ini sehingga dapat terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R. 2013. Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Graha Ilmu.
- Antriyandarti E dan Ani SW. 2015. Pengembangan agribisnis cabai merah (*Capsicum annum* L) di Kabupaten Magelang. Media Trend Vol.10 No.1 Maret 2015, h.47-50. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=32964> 5Diunduh 7 Desember 2018
- Anwarudin MJ, Sayekti AL, Marendra A dan Hilman Y. 2015. Dinamika produksi dan volatilitas harga cabai: antisipasi strategi dan kebijakan pengembangan. Pengembangan Inovasi Pertanian. Vol 8 No.1. Indonesian Center for Agricultural Library and Technology Dissemination. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/pip/article/view/2376>. Diunduh 7 Desember 2015

- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2014. Laporan kegiatan survei khusus arus bahan pangan Provinsi Sumatera Barat Th 2014. Kerjasama Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Badan Ketahanan Pangan. 2015. Statistik Ketahanan Pangan 2014. Jakarta (ID): Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
- Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat. 2016. Laporan Tahunan 2015. Jawa Barat (ID): Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- Dinas Perhubungan Komimfo Provinsi Sumatera Barat. 2016. Rekap komoditi keluar/masuk pada unit penimbangan kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Komimfo Provinsi Sumatera Barat.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah. 2016. Produksi cabai merah di Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah. Tidak diterbitkan.
- Farid M, Subekti NA. 2012. Tinjauan terhadap produksi, konsumsi, distribusi dan dinamika harga cabai di Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.6. No.2. Desember 2012. jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/132. Diunduh tanggal 6 Oktober 2018.
- Hadi S dan Susetyo AB, 2013. Analisis margin pemasaran cabai merah (*Capsicum annum* L) di kabupaten Jember. *Agritrop Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. <http://diglib.unmuhjember.ac.id/files/dis-k1/27/umj-1x-syamsulhad-1306-1-08-syam-t>
- Kementerian Perdagangan. 2013. Analisis pendirian pusat distribusi regional. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. Jakarta (ID): Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Pertanian. 2015. Informasi harga komoditas pertanian provinsi. Laporan rekapitulasi mingguan komoditas pertanian. <https://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/laprminggu4.asp>. Diunduh 16 Desember 2016
- Naully D. 2016. Fluktuasi dan disparitas harga Cabai di Indonesia. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*. Vo.1 No.1 Juni 2016. <https://jurnal.umj.ac.id.php/ftan/article/download/149/pdf>. Diunduh tanggal 6 Oktober 2018
- Pusat Data dan Informasi. 2015. Kinerja Satu Tahun Kementerian Pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2015. Statistik harga komoditas pertanian Tahun 2015. Jakarta (ID): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Simehate, S. 2009. Analisis intensitas perdagangan intradaerah dan antardaerah berdasarkan data IRIO 2000 dan 2005. [Skripsi]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.